

LKjIP 2018

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmpptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmpptsp@bulelengkab.go.id

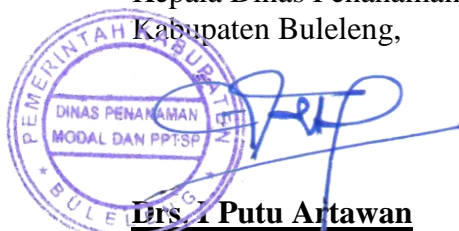
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2018 bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan yang memberikan informasi tentang keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kinerja. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Laporan ini juga disusun sebagai syarat evaluasi dan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada rencana strategis SKPD, selama tahun anggaran berjalan. Sehingga dapat dilihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2018. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Singaraja, 31 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19611231 198603 1 225

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4. Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Perencanaan Strategis	16
2.2. Indikator Penetapan Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP.....	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DPMPPTSP Tahun 2018	24
Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2018	26
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	26
Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2016-2018	27
Tabel 3.4 Perbandingan Data Realisasi Investasi Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	27
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2018	27
Tabel 3.6 Data Realisasi Investasi Tahun 2018 Berdasarkan Sektor	34
Tabel 3.7 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2018	37
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018.....	40
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP 6



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2018 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kepastian berusaha bagi investor.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus



didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kondisi Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, dipimpin oleh



Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan.

1.3.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3.4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal



- b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 berjumlah 89 orang, dengan komposisi PNS sebanyak 33 orang, Honor Daerah 2 orang, dan Tenaga Kontrak 54 orang. Data PNS diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut

1) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
2	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
3	Pengatur (II/c)	3	3	6
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
5	Penata Muda (III/a)	3	1	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	2	3
7	Penata (III/c)	4	2	6
8	Penata Tk. I (III/d)	4	2	6
9	Pembina (IV/a)	3	2	5
10	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
11	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
TOTAL :		20	13	33

2) Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	3	6
3	Eselon IV	7	4	11
4	Staf	9	6	15
TOTAL :		20	13	33

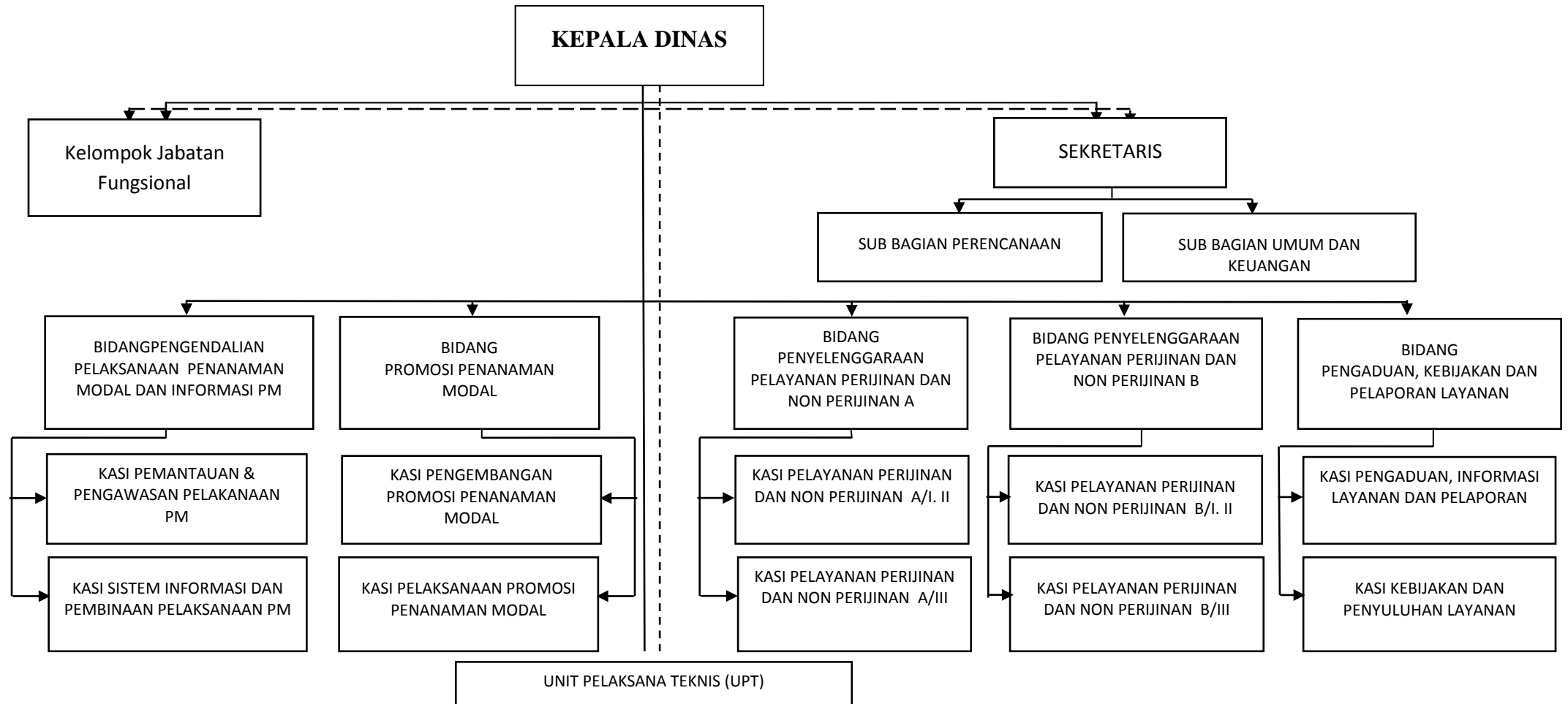
3) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	9	1	-	-	-	10
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	1	3	-	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	1	3	-	1	-	-	5
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	1	2	-	3	-	-	6
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	-	3	-	-	-	-	3
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	4	-	-	-	-	4
	TOTAL	3	25	1	4	-	-	33

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada gambar berikut.

Nomor : 75 Tahun 2016
 Tanggal : 28 Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



1.3.5. Kondisi Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perijinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal. Jumlah izin yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan tahun 2018 adalah 40 (empat puluh) jenis izin terbagi menjadi 11 (sebelas) izin bidang A dan 106 (seratus enam) izin bidang B.

a. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

Izin yang berbayar terdiri dari 3 (tiga) izin yaitu:

1. Pajak Reklame
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Sedangkan izin yang tidak berbayar terdiri dari :

4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
6. Izin Lokasi
7. Pendaftaran Penanaman Modal;
8. Penggabungan Pendaftaran Penanaman Modal;
9. Perluasan Penanaman Modal;
10. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal;
11. Persetujuan Prinsip Membangun

b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

Izin yang berbayar terdiri dari 1 (satu) izin yaitu:

1. Izin Trayek (IT)

Izin yang tidak berbayar terdiri dari 105 izin yaitu:

2. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
3. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)



4. Legalisir Izin Perndirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
5. Izin Usaha Industri (IUI)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
10. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak
11. Izin Penyedia Daging
12. Izin Pemotongan Hewan
13. Izin Penyosohan Beras
14. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok.
15. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat
16. TDUP Usaha Perjalanan Wisata
 - a. Biro Perjalanan Wisata
 - b. Agen Perjalanan Wisata
17. TDUP Penyedia Jasa Akomodasi
 - a. Hotel
 - b. Bumi Perkemahan
 - c. Persinggahan Karavan
 - d. Villa
 - e. Pondok Wisata
 - f. Akomodasi Lain
18. TDUP Jasa Makanan dan Minuman
 - a. Restoran
 - b. Rumah Makan
 - c. Kafe
 - d. Bar
 - e. Jasa Boga (Catering)
 - f. Pusat Penjualan Makanan
 - g. Usaha Jasa Daya Tarik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
19. TDUP Kawasan Pariwisata
20. TDUP Jasa Transportasi Wisata
 - a. Angkutan Jalan Wisata
 - b. Angkutan Kereta Api Wisata
 - c. Angkutan Sungai dan Danau Wisata
 - d. Angkutan Laut Domestik Wisata
 - e. Angkutan Laut Internasional Wisata

21. TDUP Daya Tarik Wisata
 - a. Pengelolaan Museum
 - b. Pengelolaan Peninggalan Sejarah
 - c. Usaha Jasa Daya Tarik Wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
22. TDUP Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
 - a. Gelanggang Olahraga
 - 1) Lapangan Golf
 - 2) Rumah Bilyar
 - 3) Gelanggang Renang
 - 4) Lapangan Teknis
 - 5) Gelanggang Bowling
 - 6) Jenis Usaha Gelanggang Olahraga lainnya yang ditetapkan Bupati
 - b. Gelanggang Seni
 - 1) Sanggar Seni
 - 2) Galeri Seni
 - 3) Gedung Pertunjukan Seni
 - 4) Gelanggang Seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
 - c. Arena Permainan
 - d. Hiburan Malam
 - 1) Klub Malam
 - 2) Diskotik
 - 3) Pub
 - e. Panti Pijat
 - f. Taman Rekreasi
 - g. Karaoke
 - h. Jasa Impresariat/Promotor
23. TDUP Jasa Pramuwisata
24. TDUP Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
25. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
26. TDUP Jasa Informasi Pariwisata
27. TDUP Wisata Tirta
 - a. Wisata Bahari
 - 1) Wisata Selam
 - 2) Wisata Perahu Layar
 - 3) Wisata Memancing
 - 4) Wisata Selancar
 - 5) Dermaga Bahari

- 6) Jenis Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
- b. Wisata Sungai, Danai dan Waduk
 - 1) Wisata Arung Jeram
 - 2) Wisata Dayung
 - 3) Sub Jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, dana dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati
28. TDUP SPA
29. Izin Kesehatan
 - 1) Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
 - 2) Surat Izin Praktek Dokter Umum
 - 3) Surat Izin Praktek Dokter Gigi
 - 4) Surat Izin Praktek Dokter Intersif
 - 5) Surat Izin Praktek Perawat
 - 6) Surat Izin Kerja Perawat
 - 7) Surat Izin Praktek Bidan
 - 8) Surat Izin Kerja Bidan
 - 9) Surat Izin Praktek Perawat Gigi dan Mulut
 - 10) Surat Izin Kerja Perawat Gigi
 - 11) Surat Izin Kerja Regraksionis Optisien (RO)
 - 12) Surat Izin Kerja ATLM (Ahli Teknologi Laboraturium Medik)
 - 13) Surat Izin Praktek Penata Anastesi
 - 14) Surat Izin Kerja Sanitarian
 - 15) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
 - 16) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
 - 17) Surat Izin Praktek Apoteker
 - 18) Surat izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
 - 19) Surat Izin Apotek
 - 20) Surat Izin Toko Obat
 - 21) Surat Izin Kerja Fisioterapi
 - 22) Surat Izin Kerja Radiografer
 - 23) Surat Izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)
 - 24) Surat Izin Perekem Medis
 - 25) Ijin Pendirian Rumah Sakit Swasta Tipe C dan D
 - 26) Izin Klinik
 - 27) Izin Apotek
 - 28) Izin Laboraturium
 - 29) Izin Optikal
 - 30) Izin Batra (Pengobat Tradisional)

- 31) PMI (Unit Transfusi Darah)
- 32) Izin Salon
- 33) SPA
- 34) Sikot

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin baik teknis maupun non teknis adalah seperti di bawah ini hanya saja jika pengurusan permohonan izin non teknis tidak adanya pembayaran ke loket pembayaran. Prosedur pengurusan perizinan adalah sebagai berikut.

1. Pemohon mendatangi loket informasi dan pengaduan untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan.
2. Petugas loket memberikan Informasi tentang persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan serta memberikan formulir pendaftaran.
3. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan secara lengkap kepada petugas loket pelayanan.
4. Petugas loket pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan termasuk dalam kategori permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan. Jika lengkap akan diteruskan ke petugas verifikasi dan menyerahkan nomor registrasi ke pemohon, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Petugas verifikasi menerima dan mengecek permohonan yang masuk Jika sesuai akan membuat draf surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan serta menambahkan lembar disposisi pada berkas dan diserahkan kepada kepala seksi. Jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Kepala Seksi memeriksa berkas dan draf surat undangan. Jika sesuai akan memaraf lembar disposisi dan mengajukan kepada Kepala Bidang untuk memohon tindak lanjut. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
7. Kepala Bidang memeriksa berkas dan draf surat undangan. Jika sesuai, akan mengajukan persetujuan verifikasi lapangan serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan verifikasi lapangan. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
8. Tim teknis melakukan pemeriksaan dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diserahkan kepada Kepala Seksi.
9. Kepala Seksi menerima hasil BAP dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang untuk membahas tindak lanjut. Jika hasil BAP Sesuai dengan

peraturan, akan menugaskan petugas untuk mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai akan membuat surat penolakan yang ditujukan kepada pemohon.

10. Petugas pencetakan mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan diserahkan kepada pemohon sebagai dasar pembayaran Retribusi di Loker Pembayaran dan Kasir.
11. Pemohon menerima dan melakukan pembayaran retribusi sesuai SKRD/SKPD.
12. Petugas pembayaran menerima biaya pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran.
13. Petugas pencetakan melakukan pencetakan dan memberikan penomoran pada surat izin dan diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi.
14. Kepala Seksi menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
15. Kepala Bidang menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
16. Kepala Dinas Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan memberikan tandatangan pada surat izin dan diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
17. Loker penyerah izin meregister dan mengarsipkan salinan izin yang terbit dan menyerahkan surat izin asli kepada pemohon.
18. Pemohon menerima surat izin sesuai yang dimohonkan.

1.4. Isu Strategis

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal

maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- c. Sudah adanya *masterplan* wilayah dalam kaitannya dengan penentuan titik pemasangan papan reklame;
- d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
 - 1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 2) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
 - 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;

- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan terutama sarana dan prasarana gedung kantor dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor;
- f. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.

1.4.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.
 - a. Merupakan daerah perkotaan sehingga berpotensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
 - b. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng yang mampu menyerap tenaga kerja
 - c. Tersedianya tempat dan event pameran yang berskala Nasional sebagai tempat promosi peluang investasi di Kabupaten Buleleng

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja. Namun demikian, sebelum diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, terlebih dahulu diuraikan perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena perjanjian kinerja mengacu kepada RPJMD dan bertujuan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan yang termuat dalam RPJMD.

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal agar pelaksanaan kegiatannya dapat sejalan dengan RPJMD dan perkembangannya dari tahun ke tahun dapat diukur dengan jelas.

2.1.1 Pernyataan Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang yang secara dinamis dipengaruhi oleh beberapa paradigma pembangunan kota di antaranya **Smart city, Livable city, Sustainable Development Goals (SDGs)** serta kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2017- 2022), dan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Buleleng yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017–2022.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut



oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 (lima) tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”.

2.1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif*” melalui tujuan yaitu :

- a. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penanaman modal dan perijinan

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui :

1. Meningkatnya jumlah investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng;
2. Kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
3. Meningkatnya layanan perijinan melalui DPMPPTSP; dan
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang penanaman modal dan perijinan

2.1.5 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi I yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal di Kabupaten Buleleng;
- b. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
- c. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

2.1.6 Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya;
- b. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan bagi investor;
- c. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi;
- d. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan;

- e. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
- f. Merumuskan Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan;
- h. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan terdiri dari program dan kegiatan penunjang dan urusan wajib.

1) Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah
 - n. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 10 kegiatan yaitu:
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Mebeleur
 - c. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
 - d. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - i. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
 - j. Penataan Halaman Gedung /Lingkungan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - c. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Perencanaan Anggaran SKPD terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Anggaran SKPD

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu :

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
- b. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
 - d. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal

- d. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi
 10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
 - b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
 - c. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
 - d. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU
 - e. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame
 - f. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan
 - g. Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan.

2.2. Indikator Penetapan Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mengalami perubahan pada tahun 2018, di mana sebelumnya pada tahun 2017 memiliki 2 IKU yaitu Laju Pertumbuhan Investasi Daerah dan Nilai IKM. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2022 seperti tersaji pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 050/28/DPMPPTSP/2018

TANGGAL : 14 PEBRUARI 2018

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	<p>Penjelasan (Alasan) :</p> <p>Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK</p> <p>Formula :</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$	DPMPPTSP	DPMPPTSP	Realisasi Investasi

2.2.1. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2018

Target investasi pada tahun 2018 adalah Rp. 1.248.778.389.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan realisasinya adalah

adalah Rp. 13.566.022.871.669,00 (Tigabelas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar 1086,34% dari target 1%. Peningkatan yang cukup besar dan signifikan ini dikarenakan adanya dengan permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. dari PPM realisasinya adalah Rp. 1.024.264.394.585,00 (Satu Triliun Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sedangkan nilai investasi yang berasal dari SIUP sebesar Rp. 12.541.758.477.084,00 (Duabelas Triliun Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). Tabel 3.1 adalah data realisasi investasi dari Triwulan I- Triwulan IV.

Tabel 3.1 Data Realisasi Investasi Tahun 2018

TW	Realisasi Investasi			Tenaga Kerja (Orang)
	PPM	SIUP	Total	
I	Rp. 146.870.000.000	Rp. 5.405.511.006.291	Rp. 5.552.381.006.291	556
II	Rp. 111.325.000.000	Rp. 229.562.379.357	Rp. 340.887.379.357	221
III	Rp. 672.496.669.585	Rp. 4.103.328.398.862	Rp. 4.775.825.068.447	812
IV	Rp. 93.572.725.000	Rp. 2.803.356.692.574	Rp. 2.896.929.417.574	442
	Rp.1.024.264.394.585	Rp. 12.541.758.477.084	Rp. 13.566.022.871.669	2.031

Namun jika dihitung persentase peningkatan nilai investasi dari target 1% dapat tercapai sebesar 997,21%. Nilai ini diperoleh dari formulasi/cara pengukuran sesuai yang tercantum pada IKU yaitu dengan rumus “jumlah realisasi tahun berjalan-jumlah realisasi tahun lalu/jumlah realisasi tahun lalu 100%”.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	Rp. 1.248.778.389.000	Rp. 13.566.022.871.669	997.21%

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng baru menangani urusan penanaman modal pada tahun 2017, data investasi dari tahun 2016 diperoleh dari Ekbang yang sebelumnya menangani urusan penanaman modal.

Tabel 3.3 Data Realisasi Investasi Tahun 2016-2018

Tahun	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
2016	Rp. 1.041.870.243.000	1.215
2017	Rp. 1.092.662.246.708	3.763
2018	Rp. 13.566.022.871.669	2.031

Pada tahun 2017 Indikator Kinerja Utama (IKU) masih terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Investasi Daerah dan Nilai IKM, hal ini berpedoman pada Renstra Transisi tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 sesuai dengan Renstra 2017-2022 hanya terdapat 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Perbandingan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 dengan tahun 2018 adalah seperti pada tabel 3.3.

Tabel 3.4 Perbandingan Data Realisasi Investasi Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	2017			2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	%	Rp. 1.050.000.000.000 (64%)	Rp. 1.092.662.246.708 (49,91%)	77,98%	-	-	-
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	-	-	-	Rp. 1.248.778.389.000 (1%)	Rp. 13.566.022.871.669 (997,21%)	1086,34%

Sedangkan untuk realisasi kinerja pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2017 adalah seperti pada tercantum pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							122,93
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Exemplar	1.200	3.803	1.000	4.432	443
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	Rekening Kantor	84	41	84	84	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	Unit/Bulan	2	2	2	2	100
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya tepat waktu	Unit	24	17	22	21	95
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	Dokumen	12	12	12	12	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	Jenis	28	28	28	28	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	Jenis	50	50	50	50	100
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	Jenis	9	8	8	8	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	Jenis	8	4	4	4	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	30	70	51	51	100
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Rekening/ Tahun	36	36	36	36	100
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	Jenis	6	6	6	6	100
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	OH	75	2	115	96	83
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	Dokumen	2	-	2	2	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							92,90
15	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1	-	1	1	100
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Unit	2	3	-	-	
17	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	Set	1	-	1	1	100
18	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	Jenis	7	8	7	7	100
19	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	Kegiatan	10	-	10	10	100
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	Paket	2	-	1	1	100
21	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Unit	24	13	22	18	82
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	Unit	7	6	7	7	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	Unit	15	10	15	7	47
24	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	Dokumen	4	-	4	4	100
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	-	1	-	-	-
26	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	Paket	1	1	1	1	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata						100
27	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli	Unit	-	4	-	-	-
28	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Stel	40	-	34	34	100
29	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel	40	34	34	34	100
30	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							50
31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	OH	4	2	4	2	50
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							100
32	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	Dokumen'	6	5	6	6	100
33	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	100
VI	Program Perencanaan Anggaran SKPD							100
34	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	100
	Program Informasi Pembangunan Daerah							
35	Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan	Jumlah pameran/pawai pembangunan yang diselenggarakan	Kali	-	4	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							100
36	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	Kali	1	4	1	1	100
37	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	Dokumen	5 Investor	7	2	2	100
38	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	Kali	7	7	1	1	100
39	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman yang disusun	Dokumen	1	1	-	-	-
VIII	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							103.33
40	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	Sistem	-	1	2	2	100
41	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Dokumen	-	1	1	1	100
42	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	Investor	-	100	100	110	110
43	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pengusaha	-	50	100	110	110
44	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah pemetaan titik reklame di sistem	Kecamatan	-	1 Dokumen	4	4	100
45	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	%	-	100	100	100	100
IX	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah							100
46	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	Dokumen	-	1	1	1	100
X	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi							

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
47	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	Sistem	1				
48	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Dokumen	1				
49	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	Investor	4 Dokumen				
50	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Pengusaha	100				
51	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah pemetaan titik reklame di sistem	Kecamatan	3 Dokumen				
52	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	%	5 Kasus				
53	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	Dokumen	1				
XI	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu							111.73
54	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	Buku		4	4	4	100
55	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang perizinan	Kecamatan		9	9	9	100
56	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Dokumen		2	2	2	100
57	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	Ijin		3.636	-	-	-
58	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	Ijin		2.951	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
59	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A1, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	2.500	3.740	149,60
60	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	500	452	90.40
61	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	1.500	2.365	157,67
62	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin		-	1.500	1.266	84.4
	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan							
63	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	Buku	4				
64	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang perizinan	Kecamatan	9				
65	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Dokumen	2				
XII	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A							
66	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A1, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	2.500				

No	Program/Kegiatan	Sasaran Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
67	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	500				
XIII	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B							
68	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	1.500				
69	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Ijin	1.500				
TOTAL								98,09

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Perencanaan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan Renstra 2017-2022 seperti pada Lampiran 1. Realisasi kinerja program/kegiatan tahun 2018 jika dibandingkan dengan Renstra 2017-2022 adalah seperti pada Lampiran 2.

d. Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif yang telah dilakukan

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.248.778.389.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan realisasinya adalah Rp. 13.566.022.871.669,00 (Tigabelas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar 1086,34% dari target dengan persentase peningkatan nilai investasi sebesar 997.21% dari target 1%.

Tabel 3.6 Data Realisasi Investasi Tahun 2018 Berdasarkan Sektor

SEKTOR	LAPANGAN USAHA	JUMLAH
SEKTOR PRIMER	Peternakan	3.150.000.000
	Kehutanan	-
	Perikanan	47.825.000.000
	Pertambangan	-
	Tanaman Pangan & Perkebunan	-
SEKTOR SEKUNDER	Industri Mineral Non Logam	-
	Industri Makanan	1.150.000.000
	Industri Tekstil	-
	Industri Barang dr Kulit & Alas kaki	-
	Industri Kayu	-
	Industri Kertas & Percetakan	-
	Industri Karet & Plastik	-
	Industri Logam, Mesin & Elektronik	-
	Industri Kendaraan & Alat Transport	-
	Industri Kendaraan Bermotor	-
	Industri Lainnya	1.570.000.000
	Industri Kimia & Farmasi	-
SEKTOR TERSIER	Jasa Lainnya	30.250.000.000
	Listrik, Gas & Air	-
	Konstruksi	-
	Perdagangan & Reparasi	22.950.000.000
	Hotel & Restoran	630.861.669.585
	Transportasi, Gudang & Komunikasi	9.772.725.000
	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	276.735.000.000
	TOTAL	1.024.264.394.585

Pelampauan target realisasi nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 disebabkan adanya permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja seperti pada tahun 2017 namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. Sehingga terjadi peningkatan pada target tahunan yang awalnya ditargetkan hanya 1%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 997,21%. Selain itu berdasarkan nilai investasi berdasarkan sektor, sektor tersier dari lapangan usaha Hotel dan Restoran nilai investasinya paling besar yaitu sebesar Rp. 630.861.669.585,00.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 2 (dua) program bidang penanaman modal dana pelayanan perizinan yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,39% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 562.677.060,00 dari anggaran sebesar Rp.

582.390.000,00 dengan capaian fisik sebesar 105,17%. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0,83% dari anggaran Rp. 159.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 158.183.100,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 9.24% dari anggaran Rp. 144.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 130.696.500,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan tingkat efisiensi sebesar 1.51% dari anggaran Rp. 54.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 54.072.940,00 dengan capaian fisik sebesar 110%, kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 2.29% dari anggaran Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.084.120,00 dengan capaian fisik sebesar 110%, %, capaian fisik yang melebihi target ini karena PPM yang dimonitoring dan dibina melebihi target disebabkan PPM yang terbit lebih dari 100 penanam modal/pengusaha, kegiatan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 1.94 dari anggaran Rp. 171.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 167.685.400,00 dengan capaian fisik sebesar 100%, dan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dengan tingkat efisiensi sebesar 0.23% dari anggaran Rp. 12.990.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.955.000,00 dengan capaian fisik sebesar 100%.

Program kedua adalah Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu, mencakup 7 (tujuh) kegiatan, namun yang mendukung tingkat pencapaian nilai investasi yang cukup tinggi ini adalah kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU, dengan tingkat efisiensi sebesar 0.28% dari anggaran Rp. 465.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 463.728.216,00 dengan capaian fisik sebesar 149,60%. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame dengan tingkat efisiensi sebesar 1.76% dari anggaran Rp. 130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 127.723.070,00 dengan capaian fisik sebesar 90.40%. Sedangkan untuk Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan, dengan tingkat efisiensi sebesar 0.95% dari anggaran Rp. 234.605.000,00 terealisasi sebesar Rp. 232.381.940,00 dengan capaian fisik sebesar 157.67% sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.19% dari anggaran Rp. 184.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 183.660.790,00 dengan capaian fisik sebesar 84.40%.

- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Program/kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal, Kajian Kebijakan Penanaman Modal, Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal, dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dengan capaian fisik 100% dan tingkat capaian keuangan lebih dari 90% sedangkan untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal tingkat capaian keuangan juga lebih dari 90% dan capaian kinerja juga melebihi 100% yaitu 110%. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk penerimaan PPM dari kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A1, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU tingkat capaian keuangan bahkan lebih dari 99% dengan capaian kinerja 149,60% dan untuk penerimaan investasi dari SIUP dari kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan tingkat capaian keuangan juga lebih dari 99% dan capaian kinerja 157,67% dengan penerimaan izin dari SIUP sebanyak 882 Ijin (Lampiran 7) dan nilai investasi yang lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sebesar Rp. 12.541.758.477.084,00 (Lampiran 8).

Kesimpulan Sasaran 1 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2018 dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi sebesar 997.21% berada di atas rentang 85 s.d 100 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi juga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

3.1.2. Capaian Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 14 (empatbelas) kegiatan realisasi capaian fisiknya rata-rata sebesar 122,93 %, di mana pada umumnya serapan anggaran kegiatan telah mencapai 97,25 %. Hampir di semua kegiatan pada program ini sudah mencapai target. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik sebanyak 4.432 Exemplar dari target yang ditentukan 1.000 exemplar atau sekitar 443%, hal ini dikarenakan jumlah surat keluar masuk yang tidak bisa

diprediksi. Ada 2 (dua) kegiatan yang realisasinya kurang dari 80%. Kegiatan pertama adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik saja yang realisasinya keuangannya 78,98%, tolak ukur pengeluaran/belanja berdasarkan kebutuhan penggunaan tiap bulannya yang tidak bisa diprediksi. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kami mampu berhemat atas penggunaan dari ketiga sarana tersebut terutama dari penggunaan Telepon dari target Rp. 6.000.000 hanya terpakai sebesar Rp.3.027.194 atau sebesar 50.45%. Anggaran yang dialokasikan tidak semuanya harus terpakai, di mana untuk komponen penggunaan Air kami juga mampu menekan penggunaan air sehingga terjadi efisiensi seperti pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Penggunaan Listrik dan Air Tahun 2018

Jenis Pembayaran	Tahun 2018			Jumlah Pemakaian
	Target	Realisasi	%	
Listrik (2 Rekening)				
- 551600002667	39.000.000	33.263.632	85.29	19.348 Kwh
- 551600115505				8.621 Kwh
Air	7.300.000	4.347.920	59.56	754 M ³

Sedangkan untuk pemakaian belanja kawat/faksimili/internet kami mampu berhemat dari target Rp. 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 12.517.679 atau 83.45%. Kegiatan kedua adalah kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang realisasi serapan anggarannya Rp. 4.875.200 dari target Rp. 9.800.000 atau sebesar 49.74%. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 92.90% sedangkan untuk serapan anggaran yaitu 93.34%. Secara umum prosentase realisasi keuangan sudah lebih dari 80%, namun secara fisik ada (satu) kegiatan yang realisasinya kurang dari 50% yaitu kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor yang realisasinya 47% hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan karena peralatan masih dalam kondisi baru dan belum mengalami kerusakan sehingga belum diperlukan pemeliharaan.
3. Capaian Kinerja dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, serta Bimbingan Rohani dan Budaya Aparatur. Dari ketiga kegiatan tersebut capaian kerjanya sudah mencapai 100% dan dari serapan anggaran sudah mencapai 99,99%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sumber Daya Aparatur, capaian realisasi fisiknya

hanya 50% dan dari serapan anggaran juga masih kecil yaitu 35%. Hal ini dikarenakan tidak adanya undangan bimtek yang harus diikuti sehingga dari target 4 OH hanya terealisasi 2 OH.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi fisiknya mencapai 100% dan serapan anggarannya mencapai 98,46%.
6. Capaian Kinerja pada Program Penyusunan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, telah mampu direalisasi sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 99,68%.
7. Ada 3 (tiga) program terkait dengan penanaman modal yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,63%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah untuk realisasi fisik dari target 1 Kali mampu terealisasi 1 kali atau sekitar 100%. Matchmaking yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Nopember 2018 bertempat di Hotel Aneka Lovina yang melibatkan seluruh UMKM di Lingkungan Kabupaten Buleleng dengan jumlah 50 UMKM. Narasumber berasal dari 1) Krisna Oleh-oleh Bali, 2) Pengusaha Bunga Pertiwi, dan 3) Bank Rakyat Indonesia. Kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari target 1 kali mampu terealisasi 1 kali atau sekitar 100%. Penyelenggaraan promosi yang dilakukan adalah ikut serta dalam Pameran Indonesia Bagian Timur (IBT) pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 s.d. Minggu, 4 Nopember 2018 bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya. Peserta dari pameran ini adalah Inasgos Team, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, PT. BNI, Pemkab Buleleng, Pemkab Kepulauan Selayar dan Provinsi NTT dengan jumlah 70 stand. Narasumber dari kegiatan pameran ini adalah Koordinator Perindo Jawa Timur (Bapak Abraham Ibuasha), Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM (Armel Arifin), Konsulat Belanda (Hans De Brabanem), Ketua Kadin Jawa Timur dan Ong Eric Yosua sebagai motivator. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,84%. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang terdiri dari 1

(satu) kegiatan yaitu Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 105,17%, dan realisasi capaian keuangannya 96,61%. Nilai investasi pada tahun 2018 adalah Rp. 1.024.264.394.585,00 (Satu Triliun Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari target Rp. 1.248.778.389.000 atau sekitar 84,08 % yang merupakan investasi yang berasal dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dan nilai investasi yang berasal dari SIUP dengan modal lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 adalah Rp. 12.541.758.477.084,00 (Duabelas Triliun Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga total nilai investasi tahun 2018 adalah Rp. 13.566.022.871.669,00 (Tigabelas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar 1086,34% dari target dengan peningkatan sebesar 997,21% dari target 1% peningkatan di tahun 2018. Besarnya realisasi persentase peningkatan nilai investasi ini dikarenakan pada tahun 2018 sesuai dengan permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi juga dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00.

8. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu, mencakup 7 (tujuh) kegiatan, pada dasarnya telah mencapai target dengan rata-rata pencapaian fisik yaitu sebesar 112,43% dan serapan anggarannya 99,20%. Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan diperoleh angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menyebarkan angket kepada 226 pemohon sebagai responden selama 2 (dua) semester yaitu semester I dan semester II. Target nilai IKM tahun 2018 adalah 80,60 pada Semester I terealisasi nilai IKM yaitu 80,69 dan pada Semester II terealisasi 80,71 sehingga rata-rata nilai IKM semester I dan semester II yaitu 80,70 dan ini berarti nilai IKM tahun 2018 sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,12%. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU, kami mentarget sebanyak 2.500 ijin, realisasi jumlah ijin yang diterbitkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.740 ijin, atau sekitar 149,60%, hal ini dikarenakan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk, dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2018 terealisasi sebanyak 3.382 izin. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan

Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame dari target 500 ijin mampu terealisasi sebanyak 452 ijin atau sekitar 90,40%. Jadi untuk total ijin di bidang A dari target 3.000 ijin terealisasi sebanyak 4.192 ijin atau sekitar 139,73%. Sedangkan untuk Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan, kami menetapkan target sebanyak 1.500 ijin, realisasi jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 2.365 Ijin atau sekitar 157,67 %, sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dari target sebanyak 1.500 ijin, realisasi jumlah ijin yang diterbitkan hanya 1.266 Ijin atau sekitar 84,4%. Sehingga jumlah total izin terbit Bidang B dari target 3.000 Ijin mampu terealisasi sebanyak 3.631 ijin. Atau sekitar 121,03 %. Jadi total jumlah izin terbit baik di bidang A maupun di Bidang B selama tahun 2018 dari target 6.000 Ijin terealisasi sebanyak 7.823 ijin atau sebesar 130,38 %.

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2018 melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan alokasi anggaran, diperoleh efisiensi pengeluaran sebesar 2,66 % yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 4.983.550.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.851.266.504,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 4,7 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 3.831.654.500,00 terealisasi sebesar Rp 3.651.857.579,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
I	Belanja Tidak Langsung	3.831.654.500	3.651.857.579	179.796.921	95.30
	1. Belanja Pegawai	3.831.654.500	3.651.857.579	179.796.921	95.30
II	Belanja Langsung	4.983.550.000	4.851.266.504	132.283.496	97.34
	1. Belanja Pegawai	616.307.000	608.062.800	8.244.200	98.66
	2. Belanja Barang Jasa	3.925.836.000	3.836.255.076	89.580.924	97.71
	3. Belanja Modal	441.407.000	406.948.628	34.458.372	92.19
	Total Belanja Daerah	8.815.204.500	8.503.124.083	312.080.417	96.45

Sumber data :LRA DPMPPTSP Kabupaten Buleleng TA. 2018
(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran program dan kegiatan untuk tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.521.664.200	1.479.915.814	41.748.386	97,25
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.782.500	57.485.500	297.000	99,48
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.300.000	53.156.425	14.143.575	78,98
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.000.000	174.714.000	286.000	99,83
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.800.000	4.875.200	4.924.800 (1 BPKB Hilang dan disesuaikan dengan kebutuhan)	49,74
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	226.901.200	221.991.400	4.909.800	97,83
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	114.700.000	114.680.730	19.270	99,98
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	222.754.500	222.332.033	422.467	99,81
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.494.000	18.429.972	64.028	99,65
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.986.340	13.660	99,84
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.407.000	324.700.748	15.706.252	95,38
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	8.400.000	8.400.000	0	100,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.925.000	19.919.966	5.034	99,97
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	176.800.000	176.713.500	86.500	99,95
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	74.400.000	73.530.000	870.000	98,83
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	427.900.000	399.406.411	28.493.589	93,34
15	Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000	79.728.000	20.272.000	79,72
16	Pengadaan Mebeleur	10.000.000	9.999.880	120	99,99
17	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	75.000.000	69.907.575	5.092.425	93,21
18	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	27.500.000	27.495.390	4.610	99,98
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	29.893.679	106.321	99,64
20	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Operasional	88.350.000	87.120.269	1.229.731	98,60
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	7.000.000	6.999.058	942	99,98

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.521.664.200	1.479.915.814	41.748.386	97,25
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	3.850.000	3.849.560	440	99,98
23	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	61.200.000	59.415.000	1.785.000	97,08
24	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	25.000.000	24.998.000	2.000	99,99
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	137.000.000	136.993.880	6.120	99,99
25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21.250.000	21.246.940	3.060	99,98
26	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	21.250.000	21.246.940	3.060	99,98
27	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	94.500.000	94.500.000	0	100,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	7.000.000	13.000.000	35,00
28	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	7.000.000	13.000.000 (Tidak ada undangan bimtek)	35,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91.180.000	90.694.900	485.100	98,46
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.855.000	52.415.750	439.250	99,16
30	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	38.325.000	38.279.150	45.850	99,88
VI	Program Perencanaan Anggaran SKPD	146.412.800	144.651.291	1.761.509	97,79
31	Penyusunan Anggaran SKPD	146.412.800	144.651.291	1.761.509	98,79
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	625.388.000	610.573.242	14.814.758	97,63
32	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	100.000.000	87.320.200	12.679.800	87,32
33	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	226.000.000	225.203.102	796.898	99,64
34	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	299.388.000	298.049.940	1.338.060	99,55
VIII	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	582.390.000	562.677.060	19.712.940	96,61
35	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	159.500.000	158.183.100	1.316.900	99,17
36	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	144.000.000	130.696.500	13.303.500	90,76
37	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	54.900.000	54.072.940	827.060	98,49
38	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.000.000	39.084.120	915.880	97,71
39	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	171.000.000	167.685.400	3.314.600	98,06

NO	KEGIATAN	KEUANGAN			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.521.664.200	1.479.915.814	41.748.386	97,25
40	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	12.990.000	12.955.000	35.000	99,73
IX	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	152.010.000	149.924.920	2.085.080	98,62
41	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	152.010.000	149.924.920	2.085.080	98,62
X	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	1.279.605.000	1.269.428.986	10.176.014	99,20
42	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	35.000.000	34.844.410	155.590	99,55
43	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	165.000.000	163.492.270	1.507.730	99,08
44	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	66.000.000	63.598.290	2.401.710	96,36
45	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	465.000.000	463.728.216	1.271.784	99,72
46	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	130.000.000	127.723.070	2.276.930	98,24
47	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	234.605.000	232.381.940	2.223.060	99,05
48	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	184.000.000	183.660.790	339.210	99,81
TOTAL		4.983.550.000	4.851.266.504	132.283.496	97,34

BAB IV

PENUTUP

Dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab IV Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat di simpulkan secara umum atas capaian kinerja serta langkah yang akan untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2018 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2018. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah :

- 1) Penetapan Anggaran perubahan yang melalui jalur prosedur yang panjang menyebabkan pelaksanaan beberapa program yang mengalami perubahan menjadi terhambat.
- 2) Realisasi keuangan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional masih kecil yaitu sebesar 49,74% karena disesuaikan dengan kebutuhan pengurusan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan, pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan juga masih kecil yaitu sekitar 35% karena dari 4 OH yang ditargetkan hanya mampu terealisasi 2 OH karena tidak adanya undangan bimtek yang diikuti. Sedangkan kinerja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor realisasi fisiknya masih kecil yaitu sekitar 47% karena sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan di mana banyak peralatan yang masih baru dan dalam kondisi yang baik sehingga tidak memerlukan pemeliharaan.
- 3) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor terealisasi pada tahun 2018 sebesar 80%, sisa 20% digunakan untuk pemeliharaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor.;
- 4) Program kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng masih terkendala oleh keterbatasan personil baik di bidang teknis maupun administrasi dan keuangan. Kapasitas staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2018 berjumlah 33 orang termasuk pimpinan terbagi kedalam 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 11 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Disamping tenaga PNS kami dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer daerah dan 53 orang tenaga kerja kontrak, sehingga jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sebanyak 88 orang.

- 5) Dengan meningkatnya animo masyarakat/badan usaha dalam mencari/mengurus perijinannya tentu berpengaruh juga terhadap ketersediaan sarana/prasarana dalam penyimpanan arsip/berkas ijin dihadapkan pada kondisi ruangan yang secara fisik tidak representatif menyimpan dokumen yang terus bertambah. Dokumen aktif yang terus bertambah perlu sebuah ruangan yang layak di samping perlu dipikirkan sistem pengarsipan dokumen secara elektronik.
- 6) Kurangnya mobilitas darat dalam menunjang pelayanan perizinan terutama untuk survey lapangan dan kegiatan pada monitoring dan evaluasi penanaman modal.
- 7) Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan dan jumlah alokasi anggaran yang diperlukan.
- 8) Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor.
- 9) Banyak pengusaha yang belum memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
- 10) Minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 11) Permohonan izin dari pemohon yang tidak bisa diprediksi jumlah pastinya sehingga berpengaruh terhadap anggaran cetak blanko ijin.
- 12) Ketidaksesuai waktu penyelesaian ijin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan ijin dan pembayaran retribusi.
- 13) Berdasarkan analisa hasil survei yang meliputi 9 unsur pelayanan meliputi Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Waktu Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, ada 3 unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan dalam hal ini adalah pemohon izin, yaitu;
 - a. Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,1106.
 - b. Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan, dengan nilai 3,1460.
 - c. Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Kecepatan Waktu Pelayanan, dengan nilai 3,1593.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain :

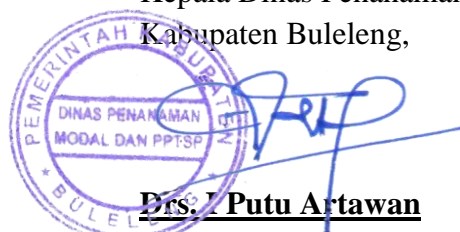
1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses Penetapan Anggaran Perubahan, serta perlu dicermati dalam perencanaan awal sehingga tidak terjadi program/kegiatan yang tidak bisa direalisasikan tepat waktu.
2. Mengantisipasi permasalahan secara administratif adalah membuat rencana kerja kegiatan dengan lebih realitis dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dan waktu penyelesaiannya tepat waktu. Oleh karena itu perlu penghitungan dan penyesuaian kembali ukuran yang dipergunakan dalam Rencana Kerja maupun Renstra agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengukuran realisasi capaian indikator kinerja (*Outcome*).
3. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada PPTK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Mengoptimalkan kapasitas personil yang ada walaupun harus ada yang merangkap dalam pelaksanaan tugas-tugas, serta memberi kesempatan kepada staf (administrasi keuangan maupun teknis) dalam menambah wawasan/pengetahuan melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun diklat-diklat berbasis informasi dan teknologi (IT) karena pada tahun ini sudah di *launching* sistem siCANTIK untuk beberapa izin dan sistem tentang *mapping* titik-titik reklame sehingga perlu adanya sosialisasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaannya sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
5. Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya dengan peningkatan server seiring dengan adanya aplikasi siCANTIK dan *mapping* titik-titik reklame, penambahan sarana mobilitas darat sehingga bisa mengakomodir kebutuhan survey lapangan dan monitoring penanaman modal.
6. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
7. Monitoring dan penjajagan ke lapangan perlu ditingkatkan dan pembinaan serta arahan kepada pengusaha lebih diintensifkan sehingga pengusaha lebih tau mengenai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan.
8. Terkait dengan OSS perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih ditingkatkan serta dari sisi SDM juga dipersiapkan misalnya dengan mengikuti Bimtek atau pelatihan.
9. Sedangkan langkah-langkah yang bersifat teknis kami senantiasa meningkatkan upaya persuasif yaitu dengan mengadakan monitoring dan sosialisasi kepada stakeholder serta senantiasa berinovasi dalam mempermudah proses perijinan, dengan tidak mengurangi legalitas dan keabsahan terhadap ijin dimaksud.

Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi jumlah dan kompetensi personil, anggaran, alat kerja, serta sarana dan prasarana, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Upaya perbaikan dari unsur Kuallitas Sarana dan Prasana yaitu melalui mengusulkan pembangunan gedung kantor baru yang sesuai dengan standar PTSP, dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan ketersediaan anggaran.
- b. Upaya perbaikan dari unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan, yaitu melalui memperkecil kesalahan produk layanan dengan melakukan koreksi berjenjang sebelum penandatanganan produk layanan tersebut.
- c. Upaya perbaikan dari unsur Kecepatan Waktu Pelayanan, yaitu melalui identifikasi hambatan-hambatan yang ada, baik di kantor maupun di lapangan, dan peningkatan pemahaman petugas pelayanan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, serta pengawasan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang ada oleh petugas.

Akhirnya, kesimpulan kami terhadap pencapaian target indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan keterbatasan kami. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19611231 198603 1 225

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan Realisasi Nilai Investasi 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2018		2019		2020		2021		2022		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	1.236.414.246.708	1.248.778.389.000 (1%)	13.566.022.871.669 (997.21%)	1.261.266.173.000 (1%)	-	1.273.878.835.000 (1%)	-	1.286.617.623.000 (1%)	-	1.299.483.799.000 (1%)	-	1.299.483.799.000 (1%)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, SH.

Pembina Tk. I

NIP.19660602 199403 1 011

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir Tahun perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian Tahun ke-										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5				
							(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)			(21)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
67		Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	2500 izin	560.000.000	-	2500 izin	450.000.000	2500 izin	500.000.000	2500 izin	570.000.000	2500 izin	560.000.000	-																							
68		Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IJUK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IJUK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	500 izin	243.175.600	-	500 izin	195.000.000	500 izin	210.551.600	500 izin	236.620.300	500 izin	243.175.600	-																							
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	-	81,50 nilai	613.175.600	-	80,80 nilai	540.000.000	81,00 nilai	600.551.600	81,25 nilai	686.620.300	81,50 nilai	613.175.600	-																							
69		Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 izin	370.000.000	-	1500 izin	320.000.000	1500 izin	380.000.000	1500 izin	450.000.000	1500 izin	370.000.000	-																							
70		Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	-	1500 izin	243.175.600	-	1500 izin	220.000.000	1500 izin	220.551.600	1500 izin	236.620.300	1500 izin	243.175.600	-																							
TOTAL				4.313.131.379	7.225.096.967	4.822.060.000	5.815.704.410	6.246.197.329	6.716.780.810	7.225.096.967	4.851.266.504	98,76	97,34																										
				Rata-rata capaian kinerja (%)																																			
				Predikat Kinerja																																			

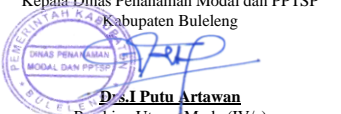
Faktor pendukung keberhasilan kinerja : jumlah izin terbit yang melebihi target sehingga mendukung pencapaian kinerja, nilai IKM yang juga melebihi target menandakan pelayanan perizinan mengalami peningkatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja: tidak adanya undangan bimtek sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan, SDM yang masih terbatas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada PPTK

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja perangkat daerah kabupaten/kota berikutnya : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan penetapan anggaran

Singaraja, 25 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng


Dr. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611231198603 1 225



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Karuna, SH

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST

Singaraja, 9 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA,

I Putu Karuna, SH

NIP. 19660602 199403 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.521.664.200,00	APBD 2018
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 427.900.000,00	APBD 2018
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 137.000.000,00	APBD 2018
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 20.000.000,00	APBD 2018
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 91.180.000,00	APBD 2018
6	Perencanaan Anggaran SKPD	Rp 146.412.800,00	APBD 2018
7	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 625.388.000,00	APBD 2018
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 582.390.000,00	APBD 2018
9	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	Rp 152.010.000,00	APBD 2018
10	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp 1.279.605.000,00	APBD 2018

Singaraja, 9 Oktober 2018

Bupati Buleleng,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP,
Kabupaten Buleleng,



Putu Agus Suradnyana, ST

I Putu Karuna, SH

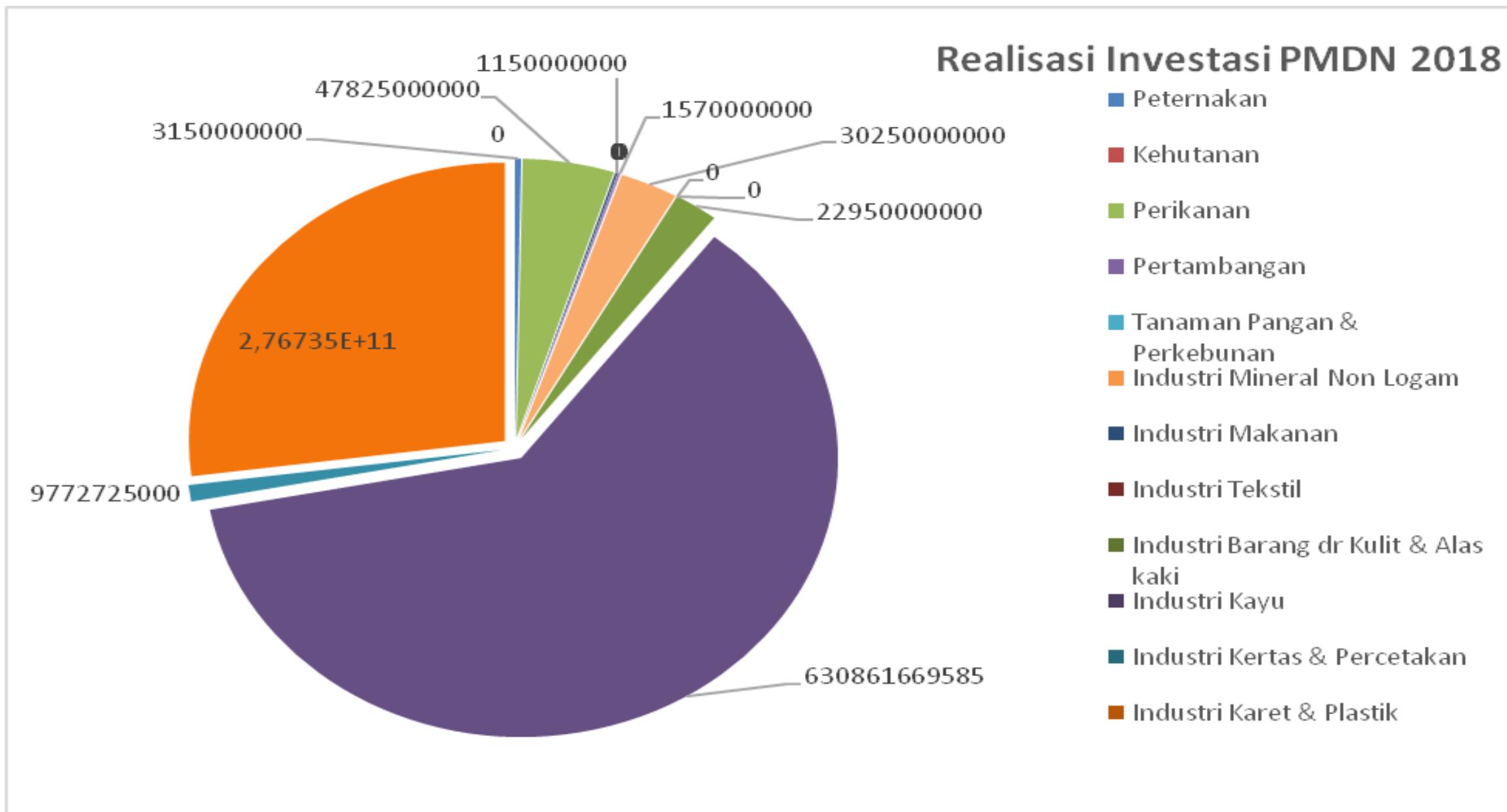
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660602 199403 1 011

Lampiran 4. Realisasi Investasi Tahun 2018

SEKTOR	LAPANGAN USAHA	JUMLAH
SEKTOR PRIMER	Peternakan	3.150.000.000
	Kehutanan	-
	Perikanan	47.825.000.000
	Pertambangan	-
	Tanaman Pangan & Perkebunan	-
SEKTOR SEKUNDER	Industri Mineral Non Logam	-
	Industri Makanan	1.150.000.000
	Industri Tekstil	-
	Industri Barang dr Kulit & Alas kaki	-
	Industri Kayu	-
	Industri Kertas & Percetakan	-
	Industri Karet & Plastik	-
	Industri Logam, Mesin & Elektronik	-
	Industri Kendaraan & Alat Transport	-
	Industri Kendaraan Bermotor	-
	Industri Lainnya	1.570.000.000
	Industri Kimia & Farmasi	-
SEKTOR TERSIER	Jasa Lainnya	30.250.000.000
	Listrik, Gas & Air	-
	Konstruksi	-
	Perdagangan & Reparasi	22.950.000.000
	Hotel & Restoran	630.861.669.585
	Transportasi, Gudang & Komunikasi	9.772.725.000
	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	276.735.000.000
TOTAL		1.024.264.394.585

**GRAFIK DATA REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
TAHUN 2018**



INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG SEMESTER I TAHUN 2018	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN :
80,69 (BAIK)	RESPONDEN JUMLAH : 226 Pemohon Periode Survey (Januari 2018 – Juni 2018)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG SEMESTER II TAHUN 2018	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN :
80,71 (BAIK)	RESPONDEN JUMLAH : 226 Pemohon JENIS KELAMIN : L = 136 Orang P = 90 Orang PENDIDIKAN : SD = 0 SMP = 2 SMA = 124 D III = 95 S 1 = 5 S 2 = - Periode Survey (01 - 07 - 2018 s/d 10 - 12 - 2018)
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN DINAS KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	

Lampiran 6. Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2018

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi	1 Input (masukan)						
	Perkantoran	Dana	Rp	57.782.500	57.485.500	99		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	exp	1000	4.432	443		
		3 Out Come (hasil)						
		Terdistribusinya Surat Keluar Masuk	exp	1000	4.432	443		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						329		
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 Input (masukan)						
	Air dan Listrik	Dana	Rp	67.300.000	53.156.425	79	Sesuai dengan	
		2 Out Put (keluaran)					kebutuhan	
		Terseleenggaranya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rek/Tahun	84	84	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air, dan Listrik	Rek/Tahun	84	84	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93		
1.02.12.1.02.12.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Input (masukan)						
	Perlengkapan Kantor	Dana	Rp	175.000.000	174.714.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya sarana mobil operasional Kepala Dinas dan Sekretaris	unit/bulan	24	24	100		
		3 Out Come (Hasil)						
		Lancarnya Mobilitas Operasional Kantor	unit/bulan	24	24	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	1 Input (masukan)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dana	Rp	9.800.000	4.875.200	50	satu kendaraan	
		2 Out Put (keluaran)					dinas	
		Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	22	21	95	BPKB hilang	
		3 Out Come (Hasil)						
		Tersedianya Surat-Surat Kelengkapan Kend. Dinas	Unit	22	21	95		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						80		
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	226.901.200	221.991.400	98		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya administrasi keuangan SKPD	dok	12	12	100		
		3 Out Come (Hasil)						
		Tersusunnya dokumen keuangan dan realisasi anggaran	dok	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	114.700.000	114.680.730	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terpeliharanya lingkungan kantor	jenis	28	28	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Alat Tulis Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	222.754.500	222.332.033	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya jumlah ATK dlm rangka operasional pelayanan publik	jenis	50	50	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya sarana penunjang pelayanan publik SKPD	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	18.494.000	18.429.972	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	jenis	8	8	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya sarana SKPD yang memadai	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	9.000.000	8.986.340	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya Komponen listrik /penerangan	jenis	4	4	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Adanya kondisi kerja yang memadai	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	340.407.000	324.700.748	95		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	unit	51	51	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya dukungan sarana prasarana penunjang pelayanan publik	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						98		
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	8.400.000	8.400.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya Jumlah Bahan bacaan	rek	36	36	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	19.925.000	19.919.966	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya bahan makan dan minum bagi pegawai dan stakeholder	jenis	6	6	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Dukungan operasional pegawai dan stakeholder	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	1 Input (masukan)						
	Keluar Daerah/Dalam Daerah	Dana	Rp	176.800.000	176.713.500	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	OH	115	96	83		
		3 Out Come (hasil)						
		Jumlah perjalanan dinas	OH	115	96	83		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						89		
1.02.12.1.02.12.01.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	74.400.000	73.530.000	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah administrasi kepegawaian terselesaikan	dok	2	2	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Tercapainya tertib administrasi kepegawaian	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Input (masukan)						
	<i>Kegiatan:</i>	Dana	Rp	100.000.000	79.728.000	80		
1.02.12.1.02.12.01.02.003	Pembangunan Gedung kantor	2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya kendaraan dinas roda dua	unit	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kendaraan dinas roda dua	unit	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93		
1.02.12.1.02.12.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	10.000.000	9.999.880	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya sofa di ruangan sekretaris	set	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Sofa	set	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	75.000.000	69.907.575	93		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya penyelenggaraan dan pengadaan sarana prasarana upacara	jenis	7	7	100		
		3 Out Come (hasil)						
		sarana upacara	Bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						98		
1.02.12.1.02.12.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	27.500.000	27.495.390	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya kegiatan lomba-lomba hari-hari besar	keg	10	10	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Lomba-lomba terikuti	keg	10	10	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	30.000.000	29.893.679	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terpeliharanya gedung kantor	unit	2	2	100		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 Out Come (hasil)						
		Gedung kantor yang nyaman dan memadai	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	1 Input (masukan)						
	Dinas/Operasional	Dana	Rp	88.350.000	87.120.269	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terpeliharanya kendaraan dinas	unit	22	18	82		
		3 Out Come (hasil)						
		Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93		
1.02.12.1.02.12.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	1 Input (masukan)						
	Gedung Kantor	Dana	Rp	7.000.000	6.999.058	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	unit	7	7	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	1 Input (masukan)						
	Gedung Kantor	Dana	Rp	3.850.000	3.849.560	100	sesuai dengan	
		2 Out Put (keluaran)					unit yang perlu	
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	15	7	47	pemeliharaan	
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						82		
1.02.12.1.02.12.01.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset	1 Input (masukan)						
	Barang Milik Daerah	Dana	Rp	61.200.000	59.415.000	97		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersusunnya dokumen inventaris aset	dok	4	4	100		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terdata dan terinventarisasinya aset SKPD	Bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.02.048	Penataan Halaman	1 Input (masukan)						
	Gedung/Lingkungan Kantor	Dana	Rp	25.000.000	24.998.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terseleenggaranya Penataan halaman gedung kantor	paket	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Halaman gedung kantor yang asri dan nyaman	paket	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Input (masukan)						
	<i>Kegiatan:</i>	Dana	Rp	21.250.000	21.246.940	100		
1.02.12.1.02.12.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	2 Out Put (keluaran)						
	Perlengkapannya	Tersedianya pakaian keki	stel	34	34	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pegawai	stel	34	34	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.03.005	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari	1 Input (masukan)						
	tertentu	Dana	Rp	21.250.000	21.246.940	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya pakaian olahraga	stel	34	34	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Pakaian olahraga untuk pegawai	stel	34	34	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	94.500.000	94.500.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya sewa mobilitas darat	kali	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK.CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terbinanya rohani dan budaya aparatur	kali	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas	1 Input (masukan)						
	Sumber Daya Aparatur	Dana	Rp	20.000.000	7.000.000	35	tidak ada	
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)					undangan	
1.02.12.1.02.12.01.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Bimbingan teknis	OH	4	2	50	bimtek	
	perundang-undangan	3 Out Come (hasil)						
		Peningkatan SDM	OH	4	2	50		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						45		
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	1 Input (masukan)						
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dana	Rp	52.855.000	52.415.750	99		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya dok.capaian kinerja SKPD	dok	6	6	100		
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Out Come (hasil)						
		Renstra,Renja,LKPJ,Laporan kinerja,Lakip dan LPPD	buku	50	50	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan	1 Input (masukan)						
	akhir tahun	Dana	Rp	38.325.000	38.279.150	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya Laporan keuangan	dok	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Laporan keuangan SKPD	dok	1	1	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	1 Input (masukan)						
	<i>Kegiatan:</i>	Dana	Rp	146.412.800	144.651.291	99		
1.02.12.1.02.12.01.07.001	Penyusunan Anggaran SKPD	2 Out Put (keluaran)						
		Tersedianya dokumen anggaran SKPD	dok	4	4	100		
		3 Out Come (hasil)						

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen RKA/DPA & RDPPA/DPPA	dok	4	4	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	100.000.000	87.320.200	87		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	Terselenggaranya matcmaking antara usaha besar dengan usaha kecil menengah	kali	2	2	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya kerjasama investor dengan usaha kecil menengah	UKM	50	50	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						96		
1.02.12.1.02.12.01.15.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	226.000.000	225.203.102	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Dikenalkannya potensi dan peluang investasi di Kab. Buleleng	dok	2	2	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Laporan hasil promosi	dok	2	2	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.15.014	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	299.388.000	298.049.940	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah sarana promosi yang didistribusikan ke investor/masyarakat	kali	3	3	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Terlaksananya Promosi penanaman modal	kali	3	3	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	159.500.000	158.183.100	99		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.16.005	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun	sistem	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya akses penanaman modal ke daerah	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.16.007	Kajian kebijakan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	144.000.000	130.696.500	91		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah kajian penanaman modal yang disusun	dok	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya kepastian hukum dalam penanaman modal	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						97		
1.02.12.1.02.12.01.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	54.900.000	54.072.940	98		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah monev yang dilaksanakan	investor	100	110	110		
		3 Out Come (hasil)						
		Terkendalnya pelaksanaan PM	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						103		
1.02.12.1.02.12.01.16.012	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	40.000.000	39.084.120	98		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah Pembinaan penanaman modal	pengusaha	100	110	110		
		3 Out Come (hasil)						
		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	bulan	12	12	100		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL AKHIR KNERJA KEGIATAN						106		
1.02.12.1.02.12.01.16.013	Penyusunan perencanaan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	171.000.000	167.685.400	98		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah Pemetaan titik reklama di sistem	kec	4	4	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya akses penanaman modal dan rencana penanaman modal	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.16.014	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	12.990.000	12.955.000	100		
		2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah kasus difasilitasi	%	100	100	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya kepatuhan hukum dalam penanaman modal	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.17.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	152.010.000	149.924.920	99		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.17.001	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah kajian	dok	1	1	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya data akses potensi investasi	bulan	12	12	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	35.000.000	34.844.410	100		
	<i>Kegiatan:</i>	2 Out Put (keluaran)						
1.02.12.1.02.12.01.18.004	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan	Data pelayanan perijinan	buku	4	4	100		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perijinan	3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya Data perijinan	buku	4	4	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.18.006	Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	1 Input (masukan)						
		Dana	Rp	165.000.000	163.492.270	99		
		2 Out Put (keluaran)						
		Terlaksananya Sosialisasi pelayanan perijinan dan perundang-undangan	kec	9	9	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Meningkatnya pengetahuan calon pemohon perijinan	kec	9	9	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						100		
1.02.12.1.02.12.01.18.007	Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat	1 Input (masukan)						
	terhadap pelayanan perijinan	Dana	Rp	66.000.000	63.598.290	96		
		2 Out Put (keluaran)						
		Tersusunnya dok. Indeks kepuasan masyarakat	dok.	2	2	100		
		3 Out Come (hasil)						
		Nilai Indeks kepuasan masyarakat	nilai	80,50	80,71	100		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						99		
1.02.12.1.02.12.01.18.012	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	1 Input (masukan)						
	Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II	Dana	Rp	465.000.000	463.728.216	100		
	pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan	2 Out Put (keluaran)						
	Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi	Jumlah permohonan perijinan yang diproses	ijin	2500	3.740	150		
	IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin	3 Out Come (hasil)						
	Prinsip,HO/SI	Tersedianya data valid sbg penetapan/penerbitan ijin	ijin	2500	3.740	150		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						133		
1.02.12.1.02.12.01.18.013	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	1 Input (masukan)						
	Penerbitan Perijinan Masyarakat A III	Dana	Rp	130.000.000	127.723.070	98		
	pada Sector Pertanian, Perikanan	2 Out Put (keluaran)						
	dan Ijin IUJK, Reklama	Jumlah permohonan perijinan yang diproses	ijin	500	452	90		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				PROSENTASE PENCAPAIAN	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data valid sbg penetapan/penerbitan ijin	ijin	500	452	90		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						93		
1.02.12.1.02.12.01.18.014	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	1 Input (masukan)						
	Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II	Dana	Rp	234.605.000	232.381.940	99		
	pada Sector Perindustrian,Perdagangan	2 Out Put (keluaran)						
	dan Pendidikan	Jumlah permohonan perijinan yang diproses	ijin	1500	2.365	158		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data valid sbg penetapan/penerbitan ijin	ijin	1500	2.365	158		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						138		
1.02.12.1.02.12.01.18.015	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan	1 Input (masukan)						
	Penerbitan Perijinan Masyarakat B III	Dana	Rp	184.000.000	183.660.790	100		
	pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	2 Out Put (keluaran)						
		Jumlah permohonan perijinan yang diproses	ijin	1500	1.266	84		
		3 Out Come (hasil)						
		Tersedianya data valid sbg penetapan/penerbitan ijin	ijin	1500	1.266	84		
TOTAL AKHIR KINERJA KEGIATAN						90		

Singaraja, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, SH

NIP. 19660602 199403 1 011

REKAP PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				97.25	122.93		
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	BHP Prov BBNKB,PAD	57.782.500	57.485.500	99.48	443	443	329
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DAU	67.300.000	53.156.425	78.98	10	100	93
1.02.12.1.02.12.01.01.003	Penyediaan jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BHP Prov BBNKB,PAD	175.000.000	174.714.000	99.83	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	DAU	9.800.000	4.875.200	49.74	95	95	80
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD	226.901.200	221.991.400	97.83	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BHP Prov BBNKB,PAD	114.700.000	114.680.730	99.98	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BHP Prov BBNKB,PAD	222.754.500	222.332.033	99.81	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DAU	18.494.000	18.429.972	99.65	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BHP Prov BBNKB,DAU	9.000.000	8.986.340	99.84	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	340.407.000	324.700.748	95.38	100	100	98
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DAU	8.400.000	8.400.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	DAU	19.925.000	19.919.966	99.97	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah	DAU	176.800.000	176.713.500	99.95	83	83	89
1.02.12.1.02.12.01.01.022	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD	74.400.000	73.530.000	99.83	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				93.34	92.90		
1.02.12.1.02.12.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	SILPA	100.000.000	79.728.000	79.72	100	100	93
1.02.12.1.02.12.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	DAU	10.000.000	9.999.880	99.99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	DAU	75.000.000	69.907.575	93.21	100	100	98
1.02.12.1.02.12.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar nasional	DAU	27.500.000	27.495.390	99.98	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	BHP Prov BBNKB	30.000.000	29.893.679	99.64	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD	88.350.000	87.120.269	98.60	82	100	93
1.02.12.1.02.12.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	BHP Prov BBNKB	7.000.000	6.999.058	99.98	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	BHP Prov BBNKB	3.850.000	3.849.560	99.98	47	100	82
1.02.12.1.02.12.01.02.045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	BHP Prov BBNKB,DAU	61.200.000	59.415.000	97.08	100	100	99

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.02.048	Penataan halaman gedung/lingkungan kantor	BHP Prov BBNKB	25.000.000	24.998.000	99.99	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				99.99	100		
1.02.12.1.02.12.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SILPA	21.250.000	21.246.940	99.98	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SILPA	21.250.000	21.246.940	99.98	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.03.006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	DAU	94.500.000	94.500.000	100	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0105.	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.00	50		
1.02.12.1.02.12.01.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BHP Prov BBNKB	20.000.000	7.000.000	35.00	50	50	45
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan							
	capaian kinerja dan Keuangan				98.46	100		
1.02.12.1.02.12.01.06.001	Penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD	52.855.000	52.415.750	99.16	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	PAD	38.325.000	38.279.150	99.88	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.07.	Program perencanaan anggaran SKPD				98.79	100		
1.02.12.1.02.12.01.07.001	Penyusunan anggaran SKPD	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD	146.412.800	144.651.291	98.79	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				97.63	100		
1.02.12.1.02.12.01.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	100.000.000	87.320.200	87.32	100	100	96
1.02.12.1.02.12.01.15.013	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	226.000.000	225.203.102	99.64	100	100	100
1.02.12.1.02.12.0115.014	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	299.388.000	298.049.940	99.55	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Informasi				96.61	103.33		
1.02.12.1.02.12.01.16.005	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	159.500.000	158.183.100	99.17	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.16.007	kajian kebijakan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	144.000.000	130.696.500	90.76	100	100	97
1.02.12.1.02.12.01.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	54.900.000	54.072.940	98.49	110	100	103

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	KEUANGAN (INPUT)			OUTPUT	OUTCOME	TOT KI KEG
			PAGU	REALISASI	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.01.16.012	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	40.000.000	39.084.120	97.71	110	100	106
1.02.12.1.02.12.01.16.013	Penyusunan perencanaan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	171.000.000	167.685.400	98.06	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.16.014	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	12.990.000	12.955.000	99.73	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.17.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah				98.62	100		
1.02.12.1.02.12.01.17.001	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	152.010.000	149.924.920	98.62	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu				99.20	111.72		
1.02.12.1.02.12.01.18.004	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perijinan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	35.000.000	34.844.410	99.55	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.18.006	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	165.000.000	163.492.270	99.08	100	100	100
1.02.12.1.02.12.01.18.007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	66.000.000	63.598.290	96.36	100	100	99
1.02.12.1.02.12.01.18.012	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU lokasi,IMB,Ijin Prinsip,HO/SI	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	465.000.000	463.728.216	99.72	150	150	133
1.02.12.1.02.12.01.18.013	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	130.000.000	127.723.070	98.24	90	90	93
1.02.12.1.02.12.01.18.014	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	234.605.000	232.381.940	99.05	158	158	138
1.02.12.1.02.12.01.18.015	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	BHP Prov BBNKB,DAU,PAD,SILPA	184.000.000	183.660.790	99.81	84	84	90
TOTAL			4.983.550.000	4.851.266.504	97,34	98.09	107	103

Singaraja, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, SH

NIP. 19660602 199403 1 011

Lampiran 7. Data Rekapitulasi Jumlah Ijin Yang Terbit Tahun 2018

NO	JENIS IJIN	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total	Ket	
PERIJINAN A								
1	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	16	10	9	4	39		
2	IJIN LOKASI	-	-	-	-	-		
3	Ijin Usaha Perikanan (IUP)	6	15	17	36	74		
4	Ijin Mendirikan Bangunan (I M B)	557	1.055	1.059	711	3.382		
5	Ijin Reklame	96	100	78	65	339		
6	SITU	96	82	92	88	358		
JUMLAH		771	1.262	1.255	904	4.192		
PERIJINAN B								
1	Ijin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	1	2	2	3	8		
2	Ijin Trayek (IT)	28	27	35	51	141		
3	Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)	28	27	35	51	141		
4	Legalisir Ijin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-		
5	Ijin Usaha Industri (IUI)	12	13	19	10	54		
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	300	219	264	268	1.051		
7	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	256	187	224	215	882		
8	Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU MB)	11	6	10	7	34		
9	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP. MB)	11	6	10	7	34		
10	Ijin Penimbunan Bahan Bakar Minyak	3	2	2	3	10		
11	Ijin Penyedia Daging	-	-	-	-	-		
12	Ijin Pematangan Hewan	-	1	-	-	1		
13	Ijin Penyosohan Beras	1	1	5	2	9		
14	Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Krosok	-	-	-	-	-		
15	Izin Pengangkutan Kayu Rakyat	-	-	-	-	-		
16	Perjalanan Wisata	-	Biro Perjalanan Wisata	1	2	3	-	6
		-	Agen Perjalanan Wisata	-	-	-	-	-
17	Penyedia Jasa Akomodasi	-	Hotel	15	12	8	14	49
		-	Bumi Perkemahan	-	-	-	-	-
		-	Persinggahan Karavan	-	-	-	-	-
		-	Villa	-	-	-	1	1
		-	Pondok Wisata	23	23	20	21	87
		-	Akomodasi Lain	-	-	-	-	-
18	Jasa Makanan dan Minuman	-	Restoran	10	11	13	12	46
		-	Rumah Makan	1	2	1	4	8
		-	Kafe	-	-	-	1	1
		-	Bar	9	10	11	10	40
		-	Jasa Boga (Catering)	-	-	-	-	-
		-	Pusat Penjualan Makanan	-	-	-	-	-
		-	Usaha Jasa Daya Tarik Wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-	-	-
19	Kawasan Pariwisata	-	-	-	-	-		
20	Jasa Transportasi Wisata	-	Angkutan Jalan Wisata	-	-	-	-	-
		-	Angkutan Kereta Api Wisata	-	-	-	-	-
		-	Angkutan sungai dan danau wisata	-	-	-	-	-
		-	Angkutan laut domestik wisata	-	-	-	-	-

NO	JENIS IJIN		TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total	Ket	
	-	Angkutan laut international wisata	-	-	-	-	-		
21	Jasa Daya Tarik Wisata	-	Pengelolaan Museum	-	-	-	-	-	
		-	Pengelolaan Peninggalan Sejarah	-	-	-	-	-	
		-	Usaha Jasa Daya Tarik Wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-	-	-	
22	Penyelenggara Hiburan dan Rekreasi	-	Gelanggang Olah Raga	Lapangan Golf	-	-	-	-	-
				Rumah Bilyar	-	-	-	-	-
				Gelanggang Renang	-	-	-	-	-
				Lapangan Tenis	-	-	-	-	-
				Gelanggang Bowling	-	-	-	-	-
				Jenis Usaha Gelanggang olah raga lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-	-	-
		-	Gelanggang Seni	Sanggar seni	1	1	1	2	5
				galeri seni	-	-	-	-	-
				gedung pertunjukan seni	-	-	-	-	-
				gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-	-	-
		-	Arena Permainan	-	-	-	1	1	
		-	Hiburan Malam	Klab Malam	-	-	-	-	-
				Diskotik	-	-	-	-	-
				Pub	-	-	-	-	-
-	Panti Pijat	-	-	1	-	1			
-	Taman Rekreasi	-	-	1	-	1			
-	Karaoke	-	-	-	-	-			
-	Jasa Impresariat / Promotor	-	-	-	-	-			
23	Jasa Pramuwisata		-	-	-	-	-		
24	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran		-	-	-	-	-		
25	Jasa Konsultan Pariwisata		-	-	-	-	-		
26	Jasa Informasi Wisata		-	-	-	-	-		
27	Wisata Tirta	-	Wisata Bahari	Wisata Selam	-	-	-	-	-
				Wisata perahu layar	-	-	-	-	-
				Wisata memancing	-	-	-	-	-
				Wisata Selancar	-	-	-	-	-
				Dermaga Bahari	-	-	-	-	-
				Jenis Usaha Wisata Bahari yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-	-	-

NO	JENIS IJIN			TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total	Ket
	-	Wisata Sungai, danau dan waduk	Wisata Arung Jeram	-	-	-	-	-	
			Wisata Dayung	-	-	-	-	-	
			Sub Jenis Usaha Lainnya dari Jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati	-	-	-	-	-	
28	SPA			2	1	1	-	4	
29	IJIN KESEHATAN	-	Surat Ijin Praktek Dokter Spesialis	18	5	29	30	82	
		-	Rekomendasi Surat Penugasan Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	
		-	Surat Ijin Praktek Dokter Umum	21	18	25	26	90	
		-	Surat Ijin Praktek Dokter Gigi	5	2	7	3	17	
		-	Surat Ijin Praktek Dokter Intersif	-	-	13	-	13	
		-	Surat Ijin Praktek Perawat	134	84	93	36	347	
		-	Surat Ijin Kerja Perawat	-	-	-	-	-	
		-	Surat Ijin Kerja Praktek Bidan	130	69	28	63	290	
		-	Surat Ijin Kerja Bidan	-	-	-	-	-	
		-	Surat Ijin Praktek Perawat Gigi dan Mulut	17	1	1	-	19	
		-	Surat Ijin Kerja Perawat Gigi	-	-	-	-	-	
		-	Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	1	2	1	1	5	
		-	Sura Ijin Kerja. ATLM (Ahli Teknologi Laboraturium Medik)	4	-	2	2	8	
		-	Surat Ijin Praktek Penata Anestesi	4	-	2	-	6	
		-	Surat Ijin Kerja Sanitarian	-	1	-	-	1	
		-	Surat Ijin Praktek Tenaga Gizi	-	1	1	1	3	
		-	Surat Ijin Kerja Tenaga Gizi	-	-	-	-	-	
		-	Surat Ijin Praktek Apoteker	5	3	10	3	21	
		-	Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	7	2	6	9	24	
		-	Surat Ijin Apotek	2	1	6	1	10	
		-	Surat Ijin Toko Obat	2	1	-	-	3	
		-	Surat Ijin Kerja Pisioterapi	-	-	6	1	7	
		-	Surat Ijin Kerja Radiografer	3	3	3	2	11	
		-	Surat Ijin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)	-	-	-	-	-	
		-	Surat Ijin Perekam Medis	-	-	-	-	-	
		-	Ijin Pendirian Rumah Sakit Swasta Tipe C dan D	-	-	-	-	-	
		-	Ijin Klinik	-	-	3	5	8	
		-	Ijin Apotek	-	-	-	-	-	
		-	Sikot	-	-	-	2	2	
		-	Unit Tranfusi Darah (UTD)/PMI	-	-	-	1	1	
		-	Ijin Laboraturium	-	-	-	-	-	
		-	Ijin Optikal	-	-	1	-	1	

NO	JENIS IJIN		TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total	Ket
	-	Ijin Battra (Pengobat Tradisional)	35	-	1	11	47	
	-	Ijin Salon	-	-	-	-	-	
	-	Ijin SPA	-	-	-	-	-	
JUMLAH			1.101	746	904	880	3.631	
JUMLAH KESELURUHAN			1.872	2.008	2.159	1.784	7.823	

Lampiran 8. Rekapitulasi Data Investasi yang Ada di Kabupaten Buleleng Tahun 2018

REKAPITULASI PERKEMBANGAN RENCANA DAN REALISASI (PMA-PMDN) TAHUN 2018

NO	BULAN	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)											PENANAMAN MODAL ASING (PMA)										
		TARGET				RENCANA				REALISASI			TARGET				RENCANA				REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp.)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	Nilai Investasi (\$)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	Pendaftaran Investasi (PPM) (Rp)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	IZIN USAHA (Rp)
3	4	TKI	TKA	7	8	TKI	TKA	11	12	TKI	TKA	15	16	TKI	TKA	19	20	TKI	TKA	23	24		
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	FEBRUARI	35	124.877.838.900	150	-	27	55.740.000.000	345	-	27	16.722.000.000	345	-	1	15.931.200.000	15	-	1	15.931.200.000	15	-	1	4.779.360.000
3	MARET	35	124.877.838.900	150	-	24	91.130.000.000	211	-	14	27.339.000.000	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JML. TRW I	70	249.755.677.800	300	-	51	146.870.000.000	556	-	41	44.061.000.000	556	-	1	15.931.200.000	15	-	1	15.931.200.000	15	-	1	4.779.360.000
4	APRIL	7	106.198.516.700	60	-	7	8.080.000.000	60	-	7	14.663.166.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MEI	20	100.315.000.000	151	-	20	100.315.000.000	151	-	20	42.333.666.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	1	168.120.000.000	17	-	1	2.930.000.000	10	-	1	13.118.166.667	-	-	1	13.882.000.000	7	-	1	13.882.000.000	7	-	1	3.470.500.000
	JML. TRW II	28	374.633.516.700	228	-	28	111.325.000.000	221	-	28	70.115.000.000	-	-	1	13.882.000.000	7	-	1	13.882.000.000	7	-	1	3.470.500.000
7	JULI	15	104.064.865.750	245	-	15	141.450.000.000	245	-	15	63.951.250.000	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	13	104.064.865.750	400	-	13	72.796.669.585	400	-	13	43.355.250.876	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	15	104.064.865.750	167	-	15	458.250.000.000	167	-	15	158.991.250.000	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JML. TRW III	43	312.194.597.250	812	-	43	672.496.669.585	812	-	-	266.297.750.876	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	14	104.064.865.750	151	-	14	33.950.000.000	151	-	14	85.294.805.799	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	14	104.064.865.750	80	-	12	18.750.000.000	80	-	12	80.734.805.799	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	14	104.064.865.750	211	-	24	40.872.725.000	211	-	24	87.371.623.299	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JML. TRW IV	42	312.194.597.250	442	-	50	93.572.725.000	442	-	50	253.401.234.896	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL INV.	183	1.248.778.389.000	1.782	-	172	1.024.264.394.585	2.031	-	119	633.874.985.772	1.810	-	2	29.813.200.000	22	-	2	29.813.200.000	22	-	2	8.249.860.000

Ket : - Kurs = Rp.

Total N I (PMA & PMDN)

Total Rencana : Rp. 1.054.077.594.585
 Total Realisasi : Rp. 642.124.845.772

Total P (PMA & PMDN)

Total Rencana : 174
 Total Realisasi : 121

Keterangan :

- NI : Nilai Investasi
- P : Proyek
- Kurs Dollar disesuaikan dengan APBN / APBNP Tahun Berjalan

Mengetahui,
 Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan
 Informasi Penanaman Modal


Ida Ayu Pancani Yuliati, SH., Msi
 NIP. 19710705 199703 2 009

Singaraja, 10 Januari 201

Kasi Sistem Informasi dan
 Pembinaan Penanaman


Dewantoro, A.Md.
 NIP. 19650528 198603 1

**REKAPITULASI DATA INVESTASI YANG ADA DI KABUPATEN BULELENG
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2018**

NO	BULAN	SIUP	PPM	TOTAL
1	JANUARI	2.014.183.228.699	-	2.014.183.228.699
2	FEBRUARI	534.967.856.006	55.740.000.000	590.707.856.006
3	MARET	2.856.359.921.586	91.130.000.000	2.947.489.921.586
4	APRIL	29.083.000.000	8.080.000.000	37.163.000.000
5	MEI	182.924.087.204	100.315.000.000	283.239.087.204
6	JUNI	17.555.292.153	2.930.000.000	20.485.292.153
7	JULI	46.584.073.862	141.450.000.000	188.034.073.862
8	AGUSTUS	2.005.775.468.000	72.796.669.585	2.078.572.137.585
9	SEPTEMBER	2.050.968.857.000	458.250.000.000	2.509.218.857.000
10	OKTOBER	454.579.017.013	33.950.000.000	488.529.017.013
11	NOVEMBER	2.235.519.768.248	18.750.000.000	2.254.269.768.248
12	DESEMBER	113.257.907.313	40.872.725.000	154.130.632.313
		12.541.758.477.084	1.024.264.394.585	13.566.022.871.669

Singaraja, 31 Januari 2018
Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman Modal



Ida Ayu Pancani Yuliati, SH.,Msi
NIP. 19710705 199703 2 009